



PEMKOT YOGYA GANDENG 21 LBH DAN OBH

Bantuan Hukum Gratis untuk Warga Miskin

YOGYA (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta kembali menjalin kerja sama dengan 21 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, ditandai dengan penandatanganan kerja sama di Balai Kota, Jumat (19/1).

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan, program bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2022 yang merupakan bentuk afirmasi kepada masyarakat Kota Yogya khususnya warga miskin untuk mendapat kepastian hukum.

"Masuk di tahun ketiga ini kami konsisten untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dalam bentuk pendampingan pada kategori litigasi maupun non litigasi. Jadi lengkap semuanya kami berikan, dengan harapan masyarakat menjadi melek dan paham soal hukum, serta ini merupakan upaya Pemkot untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Sejalan dengan itu Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Rihari Wulandari mengatakan, layanan tersebut merupakan bagian dari pe-

menuhan HAM kaitannya dengan akses terhadap keadilan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum. "Sejak tahun pertama dan masuk tahun ketiga ini alokasi anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin sejumlah Rp 264 juta. Di mana anggaran yang terserap di tahun 2022 sebesar 40,15 persen, sedangkan di tahun 2023 sebesar 53,41 persen dari dana reimburse perkara yang berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT)," terangnya.

Pihaknya berharap di tahun 2024 serapan anggaran bisa lebih baik lagi, karena mekanisme reimburse yang sebelumnya dibatasi dengan pagu anggaran per LBH atau OBH sekarang secara umum lebih terbuka bagi semua LBH atau OBH yang akan memanfaatkan. Sehingga anggaran yang telah disiapkan tersebut dapat digunakan secara optimal dalam memberikan pelayanan "serta perlindungan hukum bagi masyarakat Kota

Yogyakarta.

"Alokasi anggaran untuk kategori non litigasi tahun ini difokuskan untuk sosialisasi atau penyuluhan, sebab dari hasil evaluasi di dua tahun sebelumnya, masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan permasalahan hukum, mungkin karena takut akan biaya dan lain sebagainya," katanya.

Sementara itu perwakilan dari LBH atau OBH yang bekerja sama, Yahya Asmuy yang merupakan Direktur LBH Tentrem mengungkapkan apresiasi atas konsistensi politik anggaran Pemkot Yogyakarta dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

"Kami sangat mengapresiasi Pemkot Yogyakarta karena tetap konsisten dengan politik anggarannya di tahun 2024 untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dengan harapan di tahun ini serapannya juga bisa lebih optimal, sehingga pelayanan bantuan hukum yang profesional dapat terwujud maksimal tanpa membedakan latar belakang ekonomi masyarakat," ujarnya.

Berdasarkan data di tahun 2023, terdapat sejumlah 55



MERAPI-DOKUMEN PEMKOT YOGYAKARTA
Penandatanganan kerja sama pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

perkara yang ditangani melalui program bantuan hukum tersebut, yang didominasi oleh kasus perdata. Di mana tidak semua perkara bisa diajukan untuk difasilitasi melalui program ini. Di antaranya tindak pidana makar, kekerasan seksual, psikotropika dan zat adiktif atau narkoba. Kemudian tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Untuk mengakses bantuan hukum gratis ini bisa langsung datang ke Kantor Bagian Hu-

kum Setda Kota Yogyakarta atau langsung ke salah satu LBH maupun OBH yang telah bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta yaitu LBH Senopati, LK3 Sekar Melati, LBH Dharma Yudha, LSBH FSH UIN, PKBH FH UII, PKBH FH UMY, YLPA DIY, LBH Al Kautsar, PBHI Yogyakarta, LBH Harapan, YLBH Sikap, LBH Sekawan, YLBH Sembada, YLKBH Handayani, LKBH FH UJB, RBH Yayasan Afta, YLBHI LBH Yogya, YPBH Peradi Bantul, YLBH Apik, PKBH FH UAD dan LBH Tentrem. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005